

Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral Pada Pemilu Langsung di Manggarai (Studi Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik ‘Social Welfare’)

Marianus Mantovanny Tapung¹, Mohammad Liwa Irrubai²

¹Unika St. Paulus Ruteng, NTT, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

E-mail: ¹mtmantovanny26@gmail.com, ²liwarubai@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The Manggarai indigenous people have a strategic role in building geopolitical conduciveness and regional and national development. Because of this strategic role, many political actors try to gain support and legitimacy to carry out research and political penetration. The purpose of penetration and penetration is to be elected (again) as national and local public officials. However, some politicians try to gain support and legitimacy from the Manggarai indigenous people by playing rotten politics in the form of money politics, black campaigns, identity politics, SARA issues, and politics of reciprocity. By playing these rotten politics, political dignity and meaning as a means of creating social welfare are degraded. Observing this phenomenon, the author makes social critical research that aims to examine political ideals and their application in society. Furthermore, the authors analyze the facts and symptoms of the exploitation of indigenous peoples as a political command for the pragmatic interests of power. The benefit of this paper is that the families of indigenous peoples, political actors, and other Manggarai communities emancipate their critical awareness so that they can apply ethical politics, to create social welfare for the Manggarai community in general, and the Manggarai indigenous people in particular.

Keywords: *Manggarai indigenous peoples, political legitimacy, electoral politics, direct elections*

ABSTRAK

Masyarakat adat Manggarai memiliki peran strategis dalam membangun kondusivitas geopolitik dan pembangunan daerah dan nasional. Karena peran strategis ini, maka banyak pelaku politik yang berusaha mendapatkan dukungan dan legitimasi dengan melakukan konsolidasi dan penetrasi politik. Tujuan konsolidasi dan penetrasi ini, agar bisa terpilih (lagi) sebagai pejabat publik nasional maupun lokal. Namun, ada beberapa politisi yang berusaha mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat adat Manggarai dengan memainkan politik busuk berupa politik uang, kampanye hitam, politik identitas, isu SARA, dan politik balas budi. Dengan memainkan politik busuk ini, martabat dan makna politik sebagai sarana menciptakan kesejahteraan sosial mengalami degradasi. Mencermati fenomena ini, penulis membuat riset kritis sosial yang bertujuan untuk menelaah ideal politik dan praksis penerapannya di masyarakat. Selanjutnya penulis menganalisis fakta dan gejala eksploitasi masyarakat adat sebagai komoditas politik demi kepentingan pragmatis kekuasaan. Manfaat tulisan ini, supaya masyarakat adat, para pelaku politik dan masyarakat Manggarai lainnya, diemansipasi kesadaran kritisnya agar bisa menerapkan politik etis, demi menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat Manggarai umumnya, dan masyarakat adat Manggarai khususnya.

Kata kunci: Pendidikan Politik, Masyarakat Adat Manggarai, Legitimasi Politik, Politik Elektoral, Pemilihan Langsung

Submitted:
24 April 2021

Revised:
3 Mei 2021

Accepted:
25 Mei 2021

| | |
|--|-----------------------------------|
| Final Proof Received: 1 Juni 2021 | Published: 27 Juni 2021 |
| How to cite (in APA style): Tapung, M. M., & Irrubai, M. L. (2021). Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral Pada Pemilu Langsung di Manggarai (Studi Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik 'Social Welfare'). <i>Schemata</i> , 10 (1), 65-90. | |

PENDAHULUAN

Sistem *Gemmeinschaft* (paguyuban) merupakan salah satu identitas nasional sekaligus modal sosial bangsa Indonesia dari segi kebangsaan. Paguyuban merupakan sistem kekerabatan dimana masyarakat mempunyai ikatan primordial dari segi genealogis, emosional dan kultural yang kuat dengan kelompoknya etnisnya. Ikatan ini dilembagakan dalam bentuk organisasi tertentu yang diakui secara legitim, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh peraturan perundang-undangan.¹ Sementara dalam konteks bernegara, selain identitas nasional bangsa Indonesiatercermin pada pemilikan bahasa nasional, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, juga karena menganut sistem politik demokrasi Pancasila yang sudah mengalami pematangan sejak masa reformasi tahun 1998.

Indonesia merupakan salah satu negara majemuk secara sosial politik. Salah bentuk keberagaman itu adalah kehadiran dan eksistensi paguyuban masyarakat adat. Terdapat sekitar 70 juta anggota masyarakat adat yang bernaung pada 2.371 komunitas, yang tersebar di 32 provinsi.² Masyarakat adat merupakan suatu jenis unit sosial yang menjadi salah satu subyek dan obyek dari undang-undang pemilu langsung di Indonesia. Masyarakat adat dengan karakteristik genuin, primordial, konvensional, komunal, dan tradisional, tentu tidak bisa disepelkan dari perkembangan global dan penerapan sistem politik modern.³ Seperti masyarakat awam lainnya, sebagai subyek dan obyek, mereka memiliki hak politik elektoral, sekaligus memiliki kepentingan yang sama dalam membangun negara.⁴ Masyarakat adat dapat dibilang sebagai salah satu pilar (*belix*) dalam membangun peradaban politik di Indonesia.

Manggarai memiliki paguyuban masyarakat adat yang direkat dalam satu ikatan primordial keturunan darah, kultural, dan wilayah yang disebut 'ata manggarai' (orang Manggarai). Sementara identitas kekerabatan sosialnya dikenal dengan sebutan 'ca kuni agu kalo' (satu peradaban). Kurang lebih terdapat ada 870 paguyuban masyarakat Manggarai yang tersebar di beberapa kampung dan anak kampung di 12 kecamatan (BPS Manggarai, 2018). Secara legitim sosial, kehadiran paguyuban masyarakat adat di Manggarai ditandai dengan berdirinya rumah adat di tengah kampung atau pemukiman masyarakat. Rumah adat orang Manggarai disebut 'mbaru gendang' (rumah yang memiliki gendang besar) dan 'tambor'

¹Suharko. Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (3), 2005. 263-290. <https://doi.org/10.22146/jsp.11045>

²Tamma, Sukri and Timo Duile. Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 39(2), 2020, 270-287. DOI: 10.1177/1868103420905967

³Pratiwi, Anisa Eka, et al.,. Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi, *Jurnal Civisc, Media Kajian Kewarganegaraan*. 15 (12), 2018. 9-102. DOI: <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>

⁴Banks, J. A. Introduction: Democratic Citizenship Education in Multicultural Societies. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives*, 2004, 17-48. San Francisco, CA: Jossey-Bass

(rumah bergendang kecil). Selain sebagai simbol pengakuan eksistensi, kehadiran 'mbaru gendang' dan 'tambor', juga menjadi identitas kekuatan budaya, sosial, ekonomi, dan bahkan politik.⁵ Masih kuatnya kepercayaan orang manggarai terhadap adat dan budaya, berekuivalensi juga dengan kepercayaan terhadap otoritas para 'tua-tua gendang' (pemangku adat) di 'mbaru gendang' atau 'tambor'. Orang menyakini, dukungan dari otoritas paguyuban ini akan menjadi legitimasi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang sedang memperjuangkan tertujuan tertentu, termasuk tujuan politik. Tidak sedikit para pelaku politik (politisi) seperti calon DPR/DPRD, calon gubernur/wakil gubernur dan calon bupati/wakil bupati, yang berusaha mendapat dukungan dan legitimasi dari paguyuban masyarakat adat menjelang waktu pemilihan langsung. Sembari mengurbankan waktu, tenaga dan biaya, mereka melakukan konsolidasi dan penetrasi politik dengan bertandang ke 'mbaru gendang' dan 'tambor', berikut menjalankan berbagai kewajiban ritual adat.

Namun yang menjadi problem sosial politis, adanya kecenderungan memanfaatkan paguyuban ini sebagai komoditas dan klaim politik semata, tanpa dibarengi dengan praktek politik yang sehat. Tak jarang komunitas adat ini dieksplotasi dan dikomodifikasi hanya demi kepentingan elektoral semata, minus edukasi politik. Memang secara normatif, aktivitas politik di rumah adat dengan melibatkan masyarakat, diberi ruang oleh undang-undang pemilu, seperti untuk berkampanye. Namun secara etis kurang dapat dipertanggungjawabkan bila tidak disertai dengan pendidikan politik yang mengarah pada emansipasi kesadaran politik dan peluang menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.⁶ Beberapa oknum politisi menjadikan paguyuban masyarakat adat sebagai lahan mempraktekan politik busuk dengan memainkan politik uang, kampanye hitam, janji manis dan politik balas budi.⁷ Praktek seperti ini, selain menjebak masyarakat adat dalam kultur dan kebiasaan yang buruk, tetapi lebih dari itu, akan menjadi ancaman terhadap rusaknya kohesivitas, solidaritas dan kepercayaan terhadap otoritas sebagai masyarakat adat.⁸

Sebagai akademisi sekaligus sebagai partisan politik dengan mendukung salah satu calon kepala daerah di pemilukada Manggarai 9 Desember 2020, penulis melakukan riset dengan menggunakan metode kritiksosial bersudut pandang politik 'social welfare'. Metode kritik sosial dengan sudut pandang politik 'social welfare' lebih fokus pada praktek politik yang berupaya melibatkan paguyuban masyarakat adat dalam mendapatkan legitimasi dan dukungan politik, serta dampak yang ditimbulkan karenanya. Dalam hal ini, penulis membuat kajian secara seimbang dan faktual dengan melepas baju sebagai partisipan, serta murni (pure)

⁵ Erb, Maribeth, *The Manggaraians, A Guide to Traditional Lifestyles*. Times Subang: Malaysia; Dagur, B Antony. 1996. *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasana Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press. 1999.

⁶ Suparjan, Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(3), 1-18. 2010. <https://doi.org/10.22146/jsp.10952>

⁷ Hidayat, S. Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(3), (2010). 169-180.

⁸ Sugiswati, B. Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), (2012). 31-43. DOI: [10.30742/perspektif.v17i1.92](https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92)

membahasnya dari sisi substansi tujuan politik demokrasi Pancasila dalam menciptakan kesejahteraan sosial (*social welfare*) bagi masyarakat. Hal ini berangkat dari tujuan ideal politik menurut Plato, yakni ikhtiar dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.⁹ Tujuan riset ini adalah mencermati berbagai fenomena yang berhubungan dengan aktivitas para politisi menjelang pemilu saat mencari dukungan dan legitimasi dari paguyuban masyarakat adat di Manggarai. Sementara manfaat riset ini, yakni membangun emansipasesadaran kritis pada diri para politisi, masyarakat Manggarai umumnya, dan masyarakat adat khususnya, dalam menjalankan idealitas politik berkesejahteraan sosial. Ideal politik menurut orang Manggarai harus membawa kesejahteraan sosial yang diungkapkan: 'boleh loke, ba ca'a tara; keta api one, tela galang peang', bukan justru memecah belah persatuan dan kesatuan: 'koas neho kota, behas neho kena'.

METODE PENELITIAN

Metode kritik digagas pertama kali oleh mashab Frankfurt (*Frankfurter Schule*) Jerman. Metode kritik merujuk pada berbagai Teori Kritik Masyarakat (*eine Kritische Theorie der Gesellschaft*), yang kemudian dikembangkan oleh Popper dan Adorno dalam logika ilmu-ilmu sosial (*The Logic of the Social Sciences*).¹⁰ Secara sistematis Horkheimer dan Adorno mengembangkan metode ini dengan tujuan, selain membuka kedok ideologis praktek manipulatif-eksploitatif terhadap masyarakat, juga mengemansipasi kesadaran kritis masyarakat (*society critical awareness*).¹¹ Kehadiran metode kritik dalam metode keilmuan dan riset, telah memberi pencerahan (*aufklarung*) dalam menyingkap segala tabir yang menutup fakta a-manusiawi terhadap kesadaran. Dengan metode kritik, semua bentuk kontradiksi, penindasan, manipulasi, eksploitasi dan politisasi, dibuka secara terang benderang, sebagai upaya membebaskan masyarakat dari segala bentuk penjajahan akal budi dan emosi yang dilakukan oleh para pihak, yang memiliki keinginan tak terkendali dalam mengejar kekuasaan.

Selanjutnya, penulis mengelaborasi metode kritik dengan sudut pandang politik kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dasar dari elaborasi merujuk pada pandangan pemikir interaksionisme simbolik (*symbolic interactionism*), seperti Herbert Marcuse yang berusaha mulai mensintesis metode kritik dengan metode kritik sosial dengan memberdayakan pisau analisis sosial dan budaya.¹² Politik sebagai ilmu terapan yang bersubyek pada masyarakat dan sekitarnya, sudah semestinya menjadi lahan bagi pengembangan metode kritik sosial ini.¹³ Dalam hal ini, ideal politik sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat menjadi tilikan penting dari metode kritik sosial ini. Disparitas antara idealitas (*das sollen*) tujuan politik untuk menyejahterakan masyarakat dan kenyataan praksisnya (*das sein*) di lapangan, menjadi fokus

⁹ Tapung, Marianus, *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Bandung: Cendikia Press. (2018).

¹⁰ Verhaak, C. & R. Haryono Imam, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Gramedia: Jakarta. 1989.

¹¹ Magnis Suseno, Franz, *Filsafat sebagai ilmu kritis*, Kanisius: Jakarta. 1992.

¹² Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. (2012).

¹³ D'Cruz, Heather & Martyn Jones, *Social Work Research in Practice: Ethical and Political Contexts*, SAGE Publications Ltd: New York. 2014. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781446294963>

metode kritis sosial ini. Demi mendukung pembahasan, penulis menampilkan data dalam bentuk dokumentasi (foto) kegiatan politik dan adat, serta beberapa data kuantitatif yang mendukung kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian diskusi dan pembahasan ini, penulis membaginya dalam tiga tahapan penting, yakni: *Pertama*, konsolidasi politik. Tahap ini ditandai dengan pendekatan para pelaku politik dengan pemangku paguyuban masyarakat adat dalam rangka kunjungan/safari politik. Pendekatan ini jugadimaknai sebagai prakondisi menuju konsolidasi. Puncak tahap konsolidasi adalah penerimaan secara adat di pintu gerbang kampung dan di dalam ‘mbaru gendang’ (rumah adat besar) atau ‘tambor’ (rumah adat kecil). *Kedua*, penetrasi. Penetrasi merupakan tahap di mana para politisi menyampaikan maksud dan tujuan kehadirannya di wilayah kampung, berikut di rumah adat. Pada tahap ini, mereka menyampaikan visi-misi, program kerja dan janji-janji politik. *Ketiga*, tahap dampak elektoral. Pada tahap ini, para politisi akan ‘dievaluasi’ sejalan dengan perolehan suaranya saat pemilu. Signifikan atau tidaknya perolehan suara pada saat pemilihan langsung, sangat tergantung pada pada hasil konsolidasi dan penetrasi saat safari politiknya. Ketika tahapan ini akan dibahas dengan menggunakan metode kritis sosial dalam kaca mata politik ‘social welfare’.

a. Konsolidasi

Salah satu langkah taktis demi mendulang dukungan dan legitimasi politik, yakni dengan membuat safari politik ke paguyuban masyarakat adat di Manggarai. Seperti yang dikisahkan wartawan senior Manggarai, Markus Makur di Kompas.com *Cerita Para Caleg Berburu Restu Rob Leluhur Jelang Pemilu* (2019). Kebiasaan safari politik kepada masyarakat adat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kultur politik di Manggarai. Safari politik ini memiliki beberapa tujuan penting, yakni: *pertama*, mencari dukungan dan legitimasi politik dari masyarakat adat yang berdampak elektoral pada saat berkontestasi untuk menjadi kepala daerah (gubernur, bupati) dan anggota legislatif (DPR/DPRD). Menurut data Ditpolkom.bappenas.go.id (2018), pengaruh dukungan dari lembaga adat dan pemuka agama rata-rata hampir mencapai 4,9%. Meskipun secara nasional presentasi ini kecil, tetapi berbeda keadaannya dengan wilayah Manggarai yang memiliki karakteristik kohesivitas primordial yang masih tinggi. Masyarakat adat menjadi salah satu modal sosial politik untuk kepentingan elektoral.¹⁴ *Kedua*, dengan mendapat dukungan dan legitimasi masyarakat adat, akan membentuk persepsi dan preferensi politik dari masyarakat Manggarai umumnya. *Ketiga*, secara metafisis dan supranatural, adat merupakan sebagian dari representasi kehadiran para leluhur orang Manggarai. Membuat ritus acara adat di ‘mbaru gendang’ dan ‘tambor’ demi meminta restu leluhur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keyakinan metafisis-supranatural dalam diri orang Manggarai. Orang Manggarai memiliki keyakinan, restu para

¹⁴Suharko, Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (3), (2005). 263-290. <https://doi.org/10.22146/jsp.11045>

leluhur menjadi pratanda baik bagi seseorang untuk menghadapi bentuk-bentuk 'pertarungan' atau 'peperangan', seperti berkontestasi dalam ajang politik.

Bapak sosiologi modern, Aguste Comte,¹⁵ menggambarkan keyakinan metafisis supranatural ini sebagai salah satu tahapan perkembangan ilmu pengetahuan yang melekat pada masyarakat tradisional. Keyakinan metafisis-supranatural ini tidak bisa dijelaskan secara rasional, namun masyarakat sudah merasakannya dalam pengalaman sehari-hari. Kesuksesan dalam berkontestasi, lepas dari wabah penyakit dan bencana, dikarunia keturunan, dll, merupakan pengalaman yang impresif-faktual dalam diri orang Manggarai. Pengalaman impresif nyata ini merupakan sebagian dari hasil telah melakukan acara adat menyembah leluhur secara taat, teratur dan rigoristik.

Saat mengunjungi 'mbaru gendang' atau 'tambor', para politisi biasaya melewati beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan awal adalah prakondisi, di mana berlangsung proses



Gambar 1

Ritus 'Teing Hang' Jelang Acara Besar (Foto: Manggaraikab.go.id)

komunikasi yang bersifat struktural dan kultural oleh utusan dari pihak politisi yang berkepentingan dengan para pemangku (otoritas) adat yang disebut 'tu'a-tu'a gendang'.¹⁶ Dalam adat kebiasaan orang Manggarai, ketika melakukan pendekatan, selain ada pembicaraan (*curup; tombo*) untuk memohon kesediaan, juga diikuti dengan pemberian benda seperti sebotol atau se-jerigen tuak dan sebungkus rokok. Biasanya, permohonan masuk 'mbaru gendang' jarang ditolak.¹⁷ Dalam hal ini, siapa pun bisa datang ke rumah gendang asal dengan intensi dan kehendak baik. Berdasarkan kesepakatan dengan para pemangku adat, ditetapkan waktu (bulan, hari dan jam) dan jumlah orang yang akan menghadiri kunjungan

¹⁵Chabibi, Muhammad, Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3 (1), 2019, 14-26. DOI: 10.23971/njppi.v3i1.1191. Nugroho, Irham. 2016. "Positivisme Auguste Comte : Analisa Epistemologis Dan Nilai Etisnya", CAKRAWALA, 11 (2), 12-25. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>

¹⁶ Liliweri, A. (2002). *Makna budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LkiS

¹⁷ Erb, Maribeth, 1999. *The Manggaraians, A Guide to Traditional Lifestyles*. Times Subang: Malaysia.

dari para politisi tersebut. Keputusan jumlah yang hadir sangat berkonsekuensi pada jumlah biaya yang dianggarkan. Sesuai kesepakatan itu juga, para tu'a-tu'a gendang mengutus orang-orang muda untuk mengundang masyarakat (*siro*) secara resmi, agardapat menghadiri safari politik pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Malam sebelum acara kunjungan, beberapa orang tua adat mengadakan ritual 'teing hang wura agu ceki' (kasih makan leluhur) dengan memotong seekor ayam jantan.¹⁸ Saat acara ini, dilakukan 'torok manuk' (torok= doa, manuk = ayam). Melalui media ayam ini, salah satu tu'a adat sebagai petutur melantunkan permohonan kepada leluhur agar merestui seluruh rangkaian kegiatan yang akan berlangsung besok. Kemudian ayam tadi dibakar dan hati serta beberapa bagian dagingnya diambil untuk dijadikan 'helang' (sesajian), yang disajikan bersama dengan nasi dan garam guna memberi makan kepada para leluhur (manggarai.kab.go.id, 2018). Tujuan utama ritus ini, agar acara yang akan dibuat besoknya mendapat restu dari 'empo' (nenek moyang, leluhur) dan kerabat yang sudah meninggal.¹⁹ Restu ini menjadi pratanda mengenai kelancaran dan kesuksesannya.

Hari berikutnya, kedatangan para politisi dan rombongan disambut dengan berbagai rangkaian acara adat, tarian dan nyanyian. Acara adat, tarian dan nyanyian dirangkai dalam satu acara yang disebut 'tiba meka' (terima tamu)²⁰, yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal orang Manggarai.²¹ Di depan gerbang kampung, 'mekka' (tamu) diterima dengan 'kepok' (seruan penyambutan) oleh para tu'a adat. Benda yang turut disiapkan adalah 'tuak agu manuk curu' (tuak dan ayam penyambutan), topi dan selendang adat.²² Setelahnya, rombongan diarak menuju rumah adat, diiringi dengan tarian, nyanyian, dan bunyi gong-gendang. Sesampai di dalam rumah adat, para tamu diterima lagi secara adat dengan 'tuak agu manuk kapu' (tuak dan ayam pangku), sebagai bentuk terima kasih karena sudah mengunjungi rumah adat. Untuk membalas penyambutan (*wali*) dalam rumah adat ini, para tamu politisi menyerahkan sejumlah uang dalam amplop. Lazimnya, jumlah uang yang diberikan, disesuaikan (bahkan dilipatgandakan) dengan harga benda (ayam dan tuak) yang dipakai pada acara penyambutan tersebut. Selanjutnya, sebagai bentuk penghargaan untuk para leluhur dan keluarga yang sudah meninggal dari kampung adatitu, diberikan sejumlah

¹⁸ Susanto, Erwin, et.al., Proses Upacara Teing Hang Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Racang, *Jurnal Undiksa*. 2020. Dagur, B Antony. 1996. Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasana Kebudayaan Nasional. Surabaya: Ubhara Press. Verheijen, 1967. *Manggarai dan Wujud Tertinggi* (penerjemah: Alex Beding dan Marcel Beding). Jakarta:LIPI-RUL.

¹⁹ Saina, Fridolina, Makna dan Nilai-Nilai Pelestarian Upacara *Teing Hang Empo* pada Masyarakat Desa Kombo, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. 2020. <http://repository.ummat.ac.id/1041/1/COVER%20-%20BAB%20123.pdf>

²⁰ Keling, Gendro, Kearifan Budaya Masyarakat Kampung Tradisional Wae Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 23 (1), 2016, 51-62. <https://jurnalbpnbali.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/penelitian/article/view/4>. Pandor, P. 2015. Menyambut dan Memuliakan Sesama dalam Ritus Tiba Meka OrangManggarai, dalam Armada Riyanto, dkk. *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-butir Filsafat*, Keindonesiaan. Yogyakarta: Kanisius

²¹ Sardi, et.al., Kearifan Lokal: Sebuah Analisis Sosiologi Komunikasi di Manggarai Barat (Local Wisdom: a Sociology of Communication Analysis in West Manggarai) *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus 2019, 136-142.

²² Ndiung, Sabina & Bayu, Gede Wira, Ritus Tiba Meka orang Manggarai Dan relevansinya dengan nilai-nilai karakter, *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*. 2 (2), 2019. 14-21

uang 'wae lu'u (uang air mata/duka). Seorang tu'a berdoa untuk keselamatan jiwa dari para leluhur dan kerabat yang sudah meninggal dan mohon restu mereka untuk kelancaran acara kunjungan politik tersebut. Beberapa perempuan dewasa yang mengenakan pakaian adat datang menemui rombongan tamu dan menawarkan 'cepa' (sirih pinang) untuk dimakan para tamu. Sebagai balasannya, setelah menerima sirih pinang, para tamu memberikan sejumlah uang kepada para perempuan tersebut. Acara penyambutan adat ditutup dengan silahan minuman ringan.

Acara adat yang digambarkan di atas, merupakan acara biasa. Ada acara yang lebih besar lagi, yakni acara 'selek'(acara mempersiapkan seseorang secara adat dengan mengenakan pakaian perang). Acara selek ini diadakan, bila ada konsensus yang baik antara pihak internal rumah gendang dan pihak politisi. Acara 'selek' ini ditandai dengan ritus pemberian dan pengenaan 'kope harat' (parang tajam), 'towe songke' (kain songket) dan 'sapu' (destar penutup kepala). Makna simbolis dari pemberian dan pengenaan benda adat ini, yakni sang politisi sudah diresmikan oleh alam dan leluhur di sekitar gendang tersebut dalam ikhtiar meraih cita-cita politiknya.²³ Parang tajam merupakan simbol untuk menebas semua bentuk rintangan dan halangan. Kain songket dan penutup kepala merupakan simbol perlindungan dari berbagai serangan roh jahat, penyakit dan ancaman kematian. Go'et-go'et (ungkapan-ungkapan) yang lazim muncul dalam seruan adat pada acara ini, seperti: 'Lalong bakok do ngo'm, lalong rombeng du kole'm' (saat awal pergi berjuang seperti ayam putih polos, tetapi waktu pulang sudah seperti ayam yang berhasil dan berpengalaman); 'wake caler ngger wa, saung bembang ngger eta' (mengakar secara kuat ke dalam tanah, dan berkembang



Gambar 2

Acara 'Tiba Meka' di Gerbang Kampung (Foto: Koleksi Pribadi)

seperti daun yang melebar dan membesar ke langit), 'neka mangas ronggo do'ong' (jangan sampai ada aral melintang).

²³ Ndiung, Sabina & Bayu, Gede Wira, Ritus Tiba Meka orang Manggarai dan relevansinya dengan nilai-nilai karakter, *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*. 2 (2), 2019. 14-21

Sebelum acara ‘selek’, dibuat juga sebuah ritus penting, yakni ‘teing hang’ (kasih makan leluhur) dengan menyembelih seekor ayam jantan, yang didahului dengan doa adat. Setelah doa, ayamnya disembelih, dan uratnya diberikan kepada tu’a adat untuk ‘toto urat di’a’ (penyelidikan kondisi urat ayam). Bila kondisi urat ayamnya baik, panjang dan tidak saling melintang satu sama lain, maka menjadi pratanda tentang kesuksesan bagi sang politisi pada masa mendatang. Begitu pun sebaliknya, bila kondisi pendek dan saling melintang akan memberi pratanda yang kurang baik bagi perjalanan politik dari sang politisi. Kebaikan kondisi urat ayam dipercayai sebagai pratanda restu para leluhur terhadap perjalanan karir sang politisi. Sebagai balas untuk acara ‘toto urat di’a’ ini, sang politisi melakukan ‘wali urat di’a’ (memberikan sejumlah uang sebagai bentuk terima kasih) kepada para tu’a adat.

Bila dikemudian hari, sang politisi berhasil dalam perjuangan politiknya, maka ada kewajiban moral baginya untuk kembali ke rumah adat tersebut, dan mengadakan acara ‘caca selek’ (melepas pakaian perang). Acara ‘caca selek’ ini memberi makna bahwa pejuang sejati adalah mereka yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang mendukung dan mendoakannya. Acara ini dapat dilihat sebagai bentuk laporan bahwa dia sudah berhasil dalam perjuangannya, dan mohon dukungan bagi perjuangan selanjutnya.

Rata-rata anggota masyarakat yang hadir dalam acara safari politik ini berjumlah 500-1000 orang. Demi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan, maka para politisi menyiapkan makan-minum bagi peserta yang hadir. Sebagai biaya politik (*politic cost*), untuk makan-makan minum dengan jumlah peserta di atas, rata-rata para politisi menyiapkan uang sebanyak 10.000.000 sampai dengan 20.000.000.²⁴ Uang ini dipakai makan-minum, membeli hewan sembelihan (babi, ayam, anjing), biaya pembelian benda-benda pada acara ‘selek’, ‘wali urat di’a’, transportasi lokal bagi peserta yang jauh dari lokasi kegiatan. Tidak lupa pula, uang ‘koso



Gambar 3
Acara ‘Kapu Meka’ di Mbaru Gendang (Foto: Koleksi Pribadi)

²⁴ Pranata, Mauritius Van & Nami, Peran Elit Lokal dan Budaya Lonto Leok Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih ada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2023, *Jurnal Politicon: Jurnal Program Studi Ilmu Politik*, 11 (1), 2020. 85-107.

lime' atau 'koso number' (uang lelah) bagi ibu-ibu yang masak dan bapak-bapak yang



Gambar 4
Politisi Melakukan Kampanye di Mbaru Gendang (Foto: Koleksi Pribadi)

menyembelih hewan.

Saat acara sudah selesai dan hendak pulang, politisi juga mengikuti acara 'kepok po'e' (menahan tamu agar tidak pulang) dengan sebotol atau se-jerigen tuak. Acara ini dibuat oleh tetua adat bertolak dari alasan, para tamu sudah disiapkan tikar dan bantal untuk istirahat dan tidur. Namun, demi menjaga etika, para politisi tidak serta menolaknya. Mereka menggantikannya dengan memberi sejumlah uang kepada tetua adat. Makna simbolis dari memberi sejumlah uang ini, yakni: meminta para tetua adat untuk menjaga perangkat tidur ini. Secara imperatif-simbolik, perangkat tidur ini berikut rumah adatnya, sudah menjadi milik sang politisi. Ungkapan negatif untuk membahasakan dan menggambarkan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral politik ini lazim berbunyi: 'neka teing tange berit' (Jangan kasih bantal sandaran, karena bantal itu sudah menjadi hak/kepunyaan orang lain). Memberinya kepada orang lain yang datang dengan maksud dan tujuan sama, sangattidak diharapkan, dan secara sugestif bisa menjadi preseden buruk bagi kedua belah pihak.

b. Penetrasi demi Elektoralitas

Pada acara inti di rumah gendang, politisi diberi kesempatan untuk menyampaikan kampanye politik dalam bentuk program atau janji-janji politik, baik yang sudah dilakukan (petahana) maupun yang akan dilakukan (pendatang baru). Sekurang-kurangnya, ada dua tujuan kampanye. *Pertama*, agar masyarakat memahami visi-misi, program dan janji politik yang disampaikan. *Kedua*, memengaruhi masyarakat yang hadir untuk memilih sang politisi pada hari pemilihan. Pada tujuan pertama, para politisi perlu mempersiapkan secara baik visi-misi, program dan janji politik, serta sedapat mungkin dibahasakan secara sederhana dan adaptif, agar mudah dipahami pendengar. Ada beberapa politisi lokal dan regional bahkan nasional, yang pandai menggabungkan dan mengadaptasi bahasa kampanyenya dengan bahasa Manggarai. Penggunaan bahasa politik yang sederhana dan adaptif, sangat berkaitan

dengan daya tangkap (retensi) dari masyarakat adat Manggarai yang rata-rata berpendidikan sekolah menengah ke bawah.

Data BPS Manggarai 2016 menyatakan, 72% masyarakat Manggarai mengenyam pendidikan hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Angka putus sekolah di Manggarai masuk dalam kategori yang tinggi. Hasil riset BPS (sejak 2015), faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah, 76% karena alasan ekonomi (67,0%, karena biaya sekolah dan 8,7% harus bekerja harus bekerja dan mencari nafkah). Angka putus sekolah juga masih dipengaruhi faktor budaya sekitar 7-8%, antara lain efek hegemoni paternalisme yang masih kental di beberapa wilayah (anggapan perempuan tidak perlu sekolah tinggi), dan kebiasaan konsumtif akibat banyaknya urusan adat. Sebagian besar yang putus sekolah dan tidak mengenyam pendidikan lebih tinggi berdomisili di wilayah pedesaan, di mana akses dan modal pendidikan kurang atau bahkan tidak mendukung. Dengan demikian, untuk masyarakat yang kurang berpendidikan, menggunakan bahasa Manggarai yang sederhana, mudah dipahami, dan dielaborasi dengan 'go'et-go'et (ungkapan, pribahasa) dan 'nenggo' (nyanyian berbalas) saat berkampanye, akan mudah dicerna oleh audiens. Elaborasi dengan ungkapan dan nyanyian adat akan menciptakan kesan emosional kultural tersendiri bagi para audiens di rumah adat.

Sementara pada tujuan kedua, para politisi perlu melakukan penetrasi dalam rangka memengaruhi persepsi, preferensi pilihan politik masyarakat, berikut elektabilitas baginya.²⁵ Penetrasi ini dilakukan dalam kerangka dan desain emosional dan rasional. Target penetrasi emosional adalah peserta yang tingkat pendidikannya rendah dan kalangan ibu-ibu. Sekitar 80% pemilih di desa masuk dalam kategori pemilih emosional dan tradisional. Mereka memilih karena memiliki ikatan garis keturunan/genealogis, kesamaan wilayah, kesan-kesan yang menyentuh suasana kebatinan (penampilan diri, kesantunan, dermawan, dll), dan karena menjalankan instruksi (fatwa) otoritas adat. Masih kentalnya kepatuhan terhadap otoritas adat di Manggarai, membuat sebagian masyarakat Manggarai mematuhi keputusan tu'a-tu'a adat, termasuk soal keputusan pilihan politik. Kepatuhan ini memiliki alasan yang cukup mendasar dari sudut pandang metafisis-supranatural.²⁶ Sementara untuk segmen pemilih rasional (20%), para politisi dapat melakukan pendekatan yang lebih intelektual dan akademik.²⁷ Meskipun persentase segmen pemilih rasional ini kecil, namun mereka juga kerap menjadi referensi untuk menentukan pilihan politik. Memanfaatkan tokoh-tokoh rasional seperti sarjana, guru, kepala desa, dan pengusaha untuk menjadi tim sukses adalah salah jalan yang cukup efektif dalam upaya mendulang suara dari masyarakat. Sarjana, guru, kepala desa, dan

²⁵ Qodarsasi, Umi & Nevy, Rusmarina Dewi, Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 11 (2). 2019. 225-244. DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2282>

²⁶ Wicaksono, Dian Agung & Yurista, Ananda Prima, Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 18 (2). 2018. 75-288, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18>

²⁷ Sobari, Wawan, Elektabilitas dan Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 (1), Juni 2013. 59-84. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.218>

pengusaha merupakan orang-orang yang cukup didengar dan mendapat posisi terhormat dalam hal status dan stratifikasi sosial pada paguyuban masyarakat adat Manggarai.

Berhubungan dengan wilayah emosional dan primordial, manakala satu paguyuban dalam sebuah rumah adat sudah berkomitmen memberi dukungan politik kepada salah satu politisi dengan melakukan upacara adat dalam bentuk 'teing hang wura agu ceki' (kasih makan leluhur dan saudara-saudara yang sudah meninggal), dan mempersembahkan makanan (hang helang) tersebut kepada leluhur, serta diakhiri dengan makan bersama di rumah adat, maka akan muncul semacam ketakutan bila melakukan penyimpangan. Dalam hal ini, penyimpangan yang dimaksud adalah merubah pilihan politik pada hari pemilihan, atau menerima orang lain lagi di rumah adat yang sama dan makan minum pemberian dari para politisi, dan lalu menyatakan dukungan politik. Petuah yang berbunyi 'neka hang helang data' (jangan makan makanan persembahan orang lain) secara mistik mengikat kebanyakan orang-orang Manggarai. Petuah ini mensyaratkan adanya keteguhan, komitmen, konsistensi dan tidak mendua dalam pilihan politik. Dalam keyakinan orang Manggarai, pelanggaran terhadap kesepakatan adat atau melanggar petuah ini akan berakibat fatal, yang bisa termanifestasi dalam berbagai bentuk kemalangan (*malum*), seperti kecelakaan, sakit, bahkan kematian. Pengingkaran terhadap konsensus dan komitmen politik, diyakini akan berdampak buruk pada kehidupan individual dan sosial dalam masyarakat adat tersebut.

Yang menjadi titik kritis pada bagian penetrasi ini, ada oknum politisi yang berupaya memainkan kondisi emosional dan tradisional pada masyarakat adat di Manggarai. Oknum politisi tersebut memanfaatkan keluguan dan kepolosan masyarakat untuk kepentingan pragmatis kekuasaan. Emosionalitas dan tradisionalitas masyarakat adat dieksploitasi dan kemudian dijadikan sebagai komoditas politik demi kepentingan politik kekuasaan. Pola pragmatisme tersebut tergambar dalam beberapa aktivitas:

1. Memainkan politik uang (*money politics*) dengan membaginya kepada masyarakat pada saat kampanye, atau saat menjelang pemilihan. Kondisi ekonomi yang sederhana, miskin, dan berpendapatan rendah, membuat masyarakat adat tak berdaya ketika diberi uang dengan besaran antara 200-500 ribu. Menurut data BPS Manggarai (2018), jumlah penduduk yang masuk kategori miskin di Manggarai mencapai 58.667 jiwa (22.91%). Pada 2010, Indeks



Gambar 5
Kondisi Masyarakat Manggarai di Pedesaan (Foto: Flores.co)

kedalaman Kemiskinan Manggarai sebesar 3,57, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

sebesar 0,85. Penduduk miskin Manggarai ini merupakan sebagian dari orang miskin yang ada di NTT yang berjumlah 1.146.320 orang miskin (21,09% dari total penduduk) dengan pendapatan Rp.374.000/kapita/bulan, atau Rp. 11.500 perhari. Pendapatan per hari ini tidak cukup untuk membeli sebungkus rokok, apalagi makan sehari untuk lima anggota keluarga. Situasi keterbelakangan dan kemiskinan ini yang menyebabkan beberapa masyarakat adat di Manggarai tak tak berdaya dengan politik uang saat kampanye dan jelang pemilu. Rupanya, kecenderungan politik uang tidak terjadi secara lokal di Manggarai saja, tetapi merupakan gejala umum yang terjadi secara nasional. Menurut hasil riset Burhanuddin Muhtadi (2019), masyarakat dan pelaku politik yang terlibat dalam politik uang berada di kisaran 19,4% hingga 33,1%. Muhtadi menegaskan, kisaran ini sangat tinggi dan menjadi preseden buruk dalam kerangka politik yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

2. Mengumbar janji-janji politik fantastis dan tidak realistis tetapi menggiurkan masyarakat. Bentuk janji politik fantastis dan tidak realitas adalah ketika berbasis data tentang kondisi riil daerah, seperti keadaan geografis dan topografis, besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), lebar sempitnya Gini Ratio, kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan keadaan iklim. Menyampaikan janji politik yang tidak realistis sudah menyalahi pendidikan politik yang ideal dan mengabaikan hakekat politik itu sendiri. PAD Manggarai masih berkisar di antara 98 milyar, dan APBD hanya 1,22 trilyun untuk memberi makan kepada 344.159 jiwa, membangun 12 kecamatan, 145 desa/kelurahan, dan 850 kampung/ anak kampung. Sementara IPM Manggarai 2019, memiliki skor 61,67, berada pada peringkat enam besar terbawah di NTT. IPM NTT tahun 2017, berada pada skor 63.73. Skor ini masih jauh dari IPM Nasional sebesar 70.81, atau berada pada peringkat dua terakhir secara nasional. Sementara menurut Data BPS Manggarai (2017), tingkat pengangguran di Manggarai mencapai 4,09 % (Perempuan, 4,88%; Laki-Laki, 3,51%). Sementara indeks kriminalitas di Manggarai mengalami peningkatan 5-7% setiap tahunnya.²⁸ Tingginya angka kemiskinan, pengangguran, masalah sosial, dan masalah rendah perilaku hidup sehat dan bersih menjadi beberapa indikator penguat bagi prediksi status Kab. Manggarai sebagai salah satu wilayah tertinggal di Indonesia berdasarkan Perpres RI No. 131 tahun 2015. Nah, kondisi-kondisi riil seperti ini harus menjadi pertimbangan setiap politisi dalam membuat sekaligus mengumbar program atau janji politik kepada masyarakat.
3. Mendesain kampanye hitam (*black campaign*) terhadap calon lain, sehingga menyebabkan terbentuknya pandangan negatif masyarakat setempat terhadap politisi tertentu. Kampanye hitam ini tampak pada upaya provokatif dan ofensif dalam menyerang pribadi, keluarga, dan ranah moral²⁹ (Juditha, 2019; Supriyadi, 2015). Bahkan tidak jarang kampanye hitam ini berbaur dengan politik identitas yang bermuara pada isu suku, ras

²⁸ Tapung, Marianus, *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Bandung: Cendikia Press. 2018.

²⁹ Juditha, Christiany, Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019, *Jurnal Pekommas*, 4 (1), 2019. 61-74.

dan agama (SARA).³⁰ Masif dan sistematisnya desain kampanye hitam ini dan politisasi SARA, menyebabkan masyarakat menjadi antipati terhadap politisi tertentu dan mencabut dukungan terhadapnya.³¹ Padahal bila dilakukan penelusuran secara lebih obyektif, belum tentu apa yang diinformasikan oleh oknum politisi, terbukti dan sesuai kenyataan.

4. Dramatisasi politik balas budi. Dengan alasan tertentu, ada sebagian politisi yang melakukan tekanan politik kepada masyarakat dengan latar belakang balas budi. Sang politisi mungkin sudah menginvestasi sesuatu kepada masyarakat, seperti membangun rumah adat, rumah ibadat, gedung sekolah, memberi bantuan modal usaha, bantuan sosial, bantuan pendidikan, koperasi dengan bunga rendah, bantuan meteran listrik dan air, pembebasan lahan, dll.³². Momentum menjelang pemilu adalah saat yang tepat untuk menagih segala bentuk investasi tersebut. Ada kasus di mana, ketika sang politisi mengalami kekalahan pada hari pemilihan, maka semua bentuk bantuan atau hibah, diambil atau menuntut ganti rugi. Dramatisasi politik balas budi ini dalam pemikiran Habermas merupakan bentuk dari hegemoni politik ekonomi.³³ Ada fakta dominasi dan hegemoni politik atas masyarakat oleh para politisi yang berlatar belakang ekonomi-politik. Motif barter ekonomi di balik kegiatan politik yang tidak disadari, membuat masyarakat terjebak dengan politik balas budi ini. Politik balas budi ini selanjutnya bisa berdampak pada politik balas dendam.

c. Problem Elektoralitas

Sistem politik demokrasi Pancasila ini sudah mengalami proses pematangan yang dialektis seturut dinamika perkembangan demokrasi modern. Sejak reformasi tahun 1998, geliat demokrasi Pancasila yang lebih modern semakin mengemuka. Partai-partai tumbuh sebagai kanal aspirasi masyarakat, diikuti dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat pada berbagai hajatan pemilu.³⁴ Demi mengonstruksi kultur politik yang bermartabat dan beradab serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, disusun dan disahkannya beberapa produk undang-undang politik untuk memilih secara langsung anggota DPR/DPRD, presiden dan kepala daerah. Dalam tatanan konstitusional, produk

³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/18041711/bawaslu-ungkap-4-modus-politisasi-sara-yang-potensial-terjadi-di-pilkada?page=all>.
<https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14573991/cerita-para-caleg-berburu-restu-roh-leluhur-jelang-pemilu?page=all>

³¹ Permana, Ujang & Handriana, Idris, Pengaruh Politisasi SARA Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019, *Syntax-Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5 (2), 2020. 126-134. DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>.
Turistiati, Ade Tuti, 2018. Fenomena *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8(2):208-215, DOI: 10.31334/trans.v8i2.72

³² Puri, Widhiana Hestining, Politik Balas Budi, Buah Simalakama dalam Demokrasi Agraria di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (4), 2019. 355-365. DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.355-365

³³ Bataona, Mikhael Rajamuda dan dan Atwar Bajari. Relasi Kuasa dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi Ntt, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5 (2), Desember 2019, 121-135. DOI : <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8831>

³⁴Widjajanto, Andi. Kuadran Perdamaian Demokratrik: Integrasi Instalasi Demokrasi dan Trajektori Perdamaian. *Global*, 7 (2), Mei 2005. 1-18.

undang-undang pemilu langsung ini dirancang pemerintah dan disetujui oleh sidang legislatif. Yang menjadi subyek dan sekaligus obyek dari semua substansi undang-undang pemilu ini adalah masyarakat bangsa Indonesia. Ada beberapa tujuan penting berbagai UU Pemilu ini. *Pertama*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun negara bangsa; *kedua*, mengontrol negara dan roda pemerintahan agar bertanggung jawab menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial; *ketiga*, menjaga identitas, stabilitas dan kohesivitas nasional di antara masyarakat Indonesia, demimemelihara kedaulatan negara bangsa.

Dalam tesisnya *the Third Wave of Democratization*, Samuel Huntington,³⁵ suatu sistem politik disebut demokrasi apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur adil (jurdil). Pada sistem itu, para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan semua masyarakat berhak memberikan suara. Tingkat elektabilitas sangat dipengaruhi sejauh mana kesukaan masyarakat terhadap para politisi yang



Gambar 6
Masyarakat Manggarai di Tempat Pemungutan Suara (Foto: viva.co.id)

bersangkutan. Keterpilihan seorang politisi pada saat pemilihan politik sangat tergantung pada efektivitas dan runitas melakukan konsolidasi dan penetrasi ke akar rumput (*grass root*), termasuk kepada masyarakat adat. Meskipun yang jumlah anggota masyarakat adat hanya sebesar 35% dari jumlah penduduk di Manggarai, namun legitimasi politiknya cukup signifikan dalam membentuk persepsi dan preferensi pilihan politik masyarakat lain. Dalam hal ini, legitimasi politik masyarakat adat memiliki daya ungkit elektoral yang cukup kuat pada tingkat keterpilihan seseorang pada kontestasi politik, baik untuk menjadi anggota legislatif (DPR/D, gubernur, bupati)³⁶ (Moenawar & Santoso, 2019). Cukup berpengaruhnya efek elektoral dari legitimasi ini, maka masyarakat adat sangat

³⁵Purba, Ardyantha Sivadabert, Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 4 (1), Januari – Maret 2015., 1 – 12.

³⁶ Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. Consciousness Raising dan Partisipasi Politik Suku Baduy Di Era Digital (Tinjauan Awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), (2019). 69–80. DOI: <https://doi.org/10.46937/17201926591>

diperhitungkan setiap kali mengalami hajatan politik.³⁷ Rutinitas dan efektivitas dalam melakukan konsolidasi dan penetrasi sudah pasti berkorelasi dan berekuivalensi dengan tingkat keterpilihan sang politisi pada saat pemilihan. Dengan indeks partisipasi pemilih yang tinggi di Manggarai (di atas 77%) pada setiap hajatan pemilihan politik Manggarai (manggaraikab.go.id, 2018) manggarai, maka sangatlah penting untuk mendapatkan tempat hati di masyarakat, termasuk di hati masyarakat adat.

Mengupayakan keterkenalan (popularitas) dan tingkat keterpilihan (elektabilitas) di tengah masyarakat merupakan tugas yang cukup menguras tenaga, waktu dan biaya. Pada umumnya tingkat keterkenalan berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan. Namun pada kasus tertentu, tingkat popularitas tidak linear dengan tingkat keterpilihan.³⁸ Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi,³⁹ antara lain: *Pertama*, masyarakat sudah cukup mampu untuk menilai, baik dalam tataran rasional maupun emosional, tentang profil dan rekam jejak (*track record*) sang politisi. Kesan-kesan emosional dan pertimbangan rasional menjadi salah satu hal yang cukup menentukan tingkat keterpilihan seseorang. Perilaku yang baik dan memiliki visi-misi, program kerja yang jelas, mengena dan menjawab kebutuhan masyarakat merupakan hal yang determinan dalam menetapkan pilihan. *Kedua*, adanya faktor lain sebagai penekan dan pengganggu (*suppressor and distorter factor*) yang dilansir sebagai bagian dari politik busuk. Faktor penekan dan pengganggu tersebut, antara lain: permainan politik uang, mengumbar janji politik fantastis dan tidak realistis, mendesain kampanye hitam, dan mendramatisasi politik balas budi.⁴⁰ Selain faktor-faktor ini menjadi penekan dan pengganggu, juga bisa menciptakan anomali dalam beberapa hasil pemilihan. Beberapa politisi yang memiliki rekam jejak yang baik dan memiliki yang tren baik dalam setiap kali survei, justru tidak terpilih atau perolehan suaranya kecil pada hari pemilihan.

Dari sudut pandang kritik sosial, faktor penekan dan pengganggu, selain menjadi ancaman besar bagi penegakan demokrasi yang bermartabat, juga menciptakan krisis kepercayaan terhadap masyarakat dan sikap pesimistik politik dari para politisi. Para politisi kehilangan kepercayaan (*distrust*) kepada masyarakat karena telah melanggar komitmen ketika mereka melakukan konsolidasi. Padahal para politisi merasa sangat yakin dengan komitmen bersama masyarakat adat yang sudah dikemas dalam ritual adat. Pelanggaran dan

³⁷ Haba, John, Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12 (2), 2010. 255-267. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i2.112>. Haryanto, 2014. Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (3), 291-308. <https://doi.org/10.22146/jsp.13082>

³⁸ Sobari, Wawan, Elektabilitas dan Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 (1), Juni 2013. 59-84. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.218>

³⁹ Qodarsasi, Umi & Nevy, Rusmarina Dewi, Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 11 (2). 2019. 225-244. DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2282>

⁴⁰ Muhtadi, Burhanuddin, Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 2019. 55-74. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>. Delmana, Lati Praja, et.al., 2020. Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, www.journal.kpu.go.id, 1 (2), Mei, 1-20.

penyimpangan terhadap komitmen ini yang berdampak pada hasil buruk pada hari pemilihan, secara rasional menciptakan sikap ragu-ragu atau bimbang (skeptik) dan secara emosional membentuk sikap pesimistik dalam berkarir politik. Pada fase yang paling akut, sikap skeptik dan pesimistik berkamufase menjadi sikap fatalistik dalam berpolitik. Sikap fatalistik politik ini tampak pada beberapa fenomena terdegradasinya kultur politik lokal.

1. Pada diri politisi muncul sikap permisif terhadap permainan politik uang, mengumbar janji politik fantastis dan tidak realistis, mendesain kampanye hitam, dan mendramatisasi politik balas budi. Para politisi yang dulunya memainkan politik sehat akhirnya disorientasi politik. Tidak sedikit yang terpengaruh dan terjebak dengan memainkan pola-pola politik busuk. Mereka, akhirnya bersikap tidak mau tahu (ignorance) dan acuh tak acuh (indiferen) dengan seruan moral dari lembaga agama dan lembaga penyelenggara (KPU, Bawaslu), kepolisian dan lembaga independen. Sikap permisif, ignorance dan indiferen ini semakin mengental bila lembaga-lembaga penyelenggara pemilu dan lembaga hukum tidak berperan efektif dalam mencegah dan memberi hukuman (efek jera) bagi pada pelaku politik uang, pelaku kampanye hitam, dan pelaku politik balas budi untuk mempraktekan politik yang sehat, edukatif dan konstruktif.
2. Masyarakat, termasuk masyarakat adat, juga ikut terjebak dengan kebiasaan pola politik uang, kampanye hitam, janji manis, dan politik balas budi. Ketika terbiasa dengan pola-pola ini, masyarakat adat sebagai ikon (simbol) keluhuran dan kearifan identitas kemanggarai, mengalami distorsi. Selain distorsi ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap pengaruh dan legitimasi otoritas adat, juga menciptakan keterpecahan sosial (segregasi) secara eksternal dengan masyarakat umum, dan membentuk ketidakpatuhan sosial (*social disobedience*) secara internal dengan sesama anggota masyarakat adat. Krisis kepercayaan dan segregasi sosial ini terbawa terus pada setiap kali terjadi hajatan politik, termasuk pemilihan kepala desa. Ada berbagai sengketa friksional antara warga Manggarai dalam beberapa hajatan pemilihan kepala desa, yang dipicu oleh masalah pemilihan legislatif dan kepala daerah.⁴¹

d. Catatan Kritis

Menurut J. Kristiyanto, politik memiliki fitrah yang luhur. Dalam perspektif iman Katolik, politik sama seperti sakramen. Politik adalah sakral (Latin: *sacramentum* artinya 'kudus', 'menyelamatkan'). Sakralitasnya termaktub dalam ensensiya untuk 'menguduskan', 'menyelamatkan', menjejahterahkan dan membangun masyarakat agar lebih adil dan bermartabat. Karena sifat esensinya sangat sakral, menguduskan', 'menyelamatkan', menjejahterahkan, maka politik harus dihormati dan dijunjung tinggi⁴² (Kristiyanto, 2008). Dengan keterlibatannya dalam politik, politisi dan masyarakat akan menjadi 'kudus' bermartabat dan akan mengalami 'penyelamatan' (kesejahteraan). Dengan demikian,

⁴¹ Wance, Marno and Ibrahim, Abdul. Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics*, 1 (2) (2019). 157-174. DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>

⁴² Kristiyanto, E. *Sakramen Politik; Mempertanggungjawabkan Memoria*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera. (2008).

permainan politik uang, mengumbar janji politik fantastis dan tidak realistis, mendesain kampanye hitam, dan mendramatisasi politik balas budi, telah mencemarkan kekudusan esensi politik.⁴³ Dalam sudut pandang politik kesejahteraan sosial, mengeksploitasi kelemahan, keluguan dan kepolosan masyarakat yang tidak berdaya (*a powerless society*) adalah bentuk penghinaan yang paling fatal terhadap politik sebagai sarana untuk menjunjung harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Sebagai keluhuran dan kekudusan, harkat dan martabat ini sudah tertera jelas dalam konsitusi negara. Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 menggambarkan secara lugas pentingnya keterlibatan warga negara Indonesia untuk terlibat dalam politik, sebagai bagian dari kewajiban sekaligus hak untuk membangun negara bangsa Indonesia. Hak politik sebagai warga negara menjadi salah satu poin penting dalam deklarasi hak asasi manusia di Jenewa-Swiss tahun 1948. Pengakuan terhadap hak politik ini merupakan bagian dari legasi keberadaan manusia sebagai makhluk bermasyarakat (*zoon politicon*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, di mana manusia memiliki hasrat gregariousness) untuk berinteraksi dengan anggota masyarakat lain.⁴⁴ Adam Smith (1723-1790) menggambarkan bahwa manusia adalah sesama bagi yang lain (*homo socius*). Kehadiran manusia sebagai sesama akan memberi keuntungan baik yang bersifat sosial, ekonomi dan kesejahteraan. Namun di sisi lain, Thomas Hobbes justru melihat manusia menjadi ancaman (srigala) bagi yang lain (*homo homini lupus*). Agar manusia tidak menjadi ancaman bagi sesama, maka perlu dibentuk sebagai tatanan norma dan hukum yang dapat akan menjaga ketertiban sosial dan menciptakan kenyamanan dan kesejahteraan sosial, sehingga manusia tetap menjadi sesama bagi yang lain (*homo homini socius*), atau Thomas Aquinas menyebut sebagai ‘manusia menjadi Tuhan bagi yang lain (*homo homini deus*).⁴⁵

Dalam karyanya ‘Republik’ atau ‘politeia’ Plato (427-347 SM) menyebut, salah satu instrumen penting untuk menciptakan keteraturan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dengan politik.⁴⁶ Politik menjadi bagian untuk membangun sebuah sistem ‘organisme’ yang baik dan benar, di mana setiap anggota atau bagian masyarakat membentuk suatu kesatuan yang bulat dan tidak dapat dipisahkan dari rangka keseluruhan itu. Setiap anggota atau bagian itu mempunyai fungsi yang akan memberi pengaruh pada anggota yang lainnya bahkan berpengaruh pada organisme yang lebih besar. Oleh karena itulah Plato menyatakan, apabila anggota atau bagian itu tidak menjalankan fungsinya atau “sakit” maka organisme, dalam hal ini negara, akan merasa sakit. Sehingga menurut Plato apabila setiap anggota atau bagian mengerjakan apa yang menjadi fungsinya keadilan dan kesejahteraan akan tercapai. Menurut Plato, selain hukum dan pendidikan, politik merupakan salah satu instrumen yang dipakai negara agar sistem dalam negara dapat berjalan baik dan mengarah pada keadilan dan kesejahteraan sosial. Montesquieu (1689-1755) menyebut, politik akan turut mengatur

⁴³ Nayuf, Henderikus, Politisasi Doa: Menalar Pilihan Politik Abraham Terhadap Sodom. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*, 5 (2), 2019. 112-127. DOI: <https://doi.org/10.37196/kenosis.v5i2.79>

⁴⁴ Hardiman, F. B. *Demokrasi deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius. (2009).

⁴⁵ Fauzi, F. *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*. Jakarta: Penerbit Jalasutra. (2014).

⁴⁶ Kleden, I. *Masyarakat dan negara*. Magelang: Indonesia Tera (2004).

berbagai kebijakan penting dalam suatu negara demi kepentingan semua masyarakatnya agar roda pemerintahan berjalan di bawah kontrol masyarakat sebagai bagian dari sistem negara tersebut.⁴⁷ Politik kesejahteraan sosial ini, kemudian menjadi bahan pengembangan pemikiran politik dari Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan JJ Rousseau (1712-1778).⁴⁸

Langkah taktis dan pragmatis dalam memanfaatkan masyarakat umumnya dan masyarakat adat khususnya, dalam mendulang dukungan dan legitimasi merupakan suatu keseharusan (*conditio sine qua non*), sebagai bagian dari upaya pertimbangan geopolitik negara bangsa.⁴⁹ Dalam hal ini, geopolitik diartikan sebagai sistem kebijaksanaan dan strategi nasional untuk menampung segala bentuk aspirasi yang bersifat geografik, wilayah atau teritorial. Partisipasi masyarakat adat dalam politik demokrasi secara aktif akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu Negara.⁵⁰ Sebaliknya, bila politik negara kondusif, maka akan berdampak pada kondisi geopolitik yang stabil di tingkat lokal maupun nasional.⁵¹ Sangat diharapkan praktek politik lokal maupun nasional dijalankan dengan benar demi membantu mengembangkan geopolitik negara bangsa, dengan sedapat mungkin mencegah dan menghindari pola-pola permainan politik yang bertujuan menciderai dan memberangus hakekat demokrasi Pancasila.

Seturut perspektif kritik sosial dengan sudut pandang etika politik kesejahteraan sosial (*social welfare political etics*), permainan politik uang, mengumbar janji politik fantastis dan tidak realistis, mendesain kampanye hitam, dan mendramatisasi politik balas budi merupakan bagian dari berbagai penyimpangan terbesar dalam politik demokrasi modern. Selain demi kepentingan kekuasaan semata, pola-pola ini merupakan eksplisitasi dari rendahnya kapasitas dan kapabilitas moral politik sebagai seorang calon pemimpin.⁵² Jika pola-pola deviatif ini sering diterapkan oleh oknum-oknum politisi, maka akan berdampak buruk pada kultur peradaban politik di masa yang akan datang. Pola ini akan mendegradasi dan menciderai nilai-nilai luhur martabat politik, yang sebenarnya bertujuan untuk mematangkan kualitas demokrasi, memajukan pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Praktek politik busuk dengan mengeksploitasi kelemahan, keluguan dan kepolosan

⁴⁷ Haryatmoko. *Etika publik. untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2011).

⁴⁸ Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014.

⁴⁹ Mahpudin, Mahpudin, Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih, *Politicon. Jurnal Ilmu Politik*, 2 (2), 2020. 113-128. DOI: <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>

⁵⁰ Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), (2017). 27-44. DOI: <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.4>

⁵¹ Anggoro, Kusnanto, Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Kajian Lembannas RI, edisi 29 Maret 2017*, 5-17.

⁵² Mariana, Dede, & Luthfi Hamzah Husin, Democracy, Local Election, and Political Dynasty in Indonesian Politics, *Jurnal Wacana Politik 2 (2)*, 2017. 88-97. doi.org/10.24198/jwp.v2i2.13998

masyarakat adat di pedesaan dalah bentuk kecelakaan (malum) dalam berpolitik demokrasi.⁵³ Para oknum politisi yang melakukannya bisa masuk dalam kelompok pencundang politik (*political loser*).

Dengan demikian, keterlibatan masyarakat (adat) dalam mengambil bagian membangun negara perlu diatur sedemikian rupa melalui sistem politik yang demokratis. Dengan sistem politik yang demokratis terjadi keseimbangan antara negara dan masyarakat melalui kehadiran tiga lembaga penting (*trias politica*), yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masyarakat adat merupakan salah satu organisme negara bangsa yang harus dihargai dan diperhatikan. Sebagai bagian dari entitas dan identitas kemanggarai serta menjadi salah satu anasir perekat kohesitas kultural dan sosial, masyarakat adat Manggarai harus tetap mendapat tempat dalam mempertahankan kebangsaan Indonesia.⁵⁴ Masyarakat adat Manggarai merupakan salah satu bagian tubuh negara bangsa yang memiliki peran sentral dalam membangun dan mempertahankan negara bangsa Indonesia. Sebagai salah satu aktivitas untuk membangun negara bangsa, politik dan para pelakunya sedapat mungkin menjadikan masyarakat adat sebagai subyek yang harus dihargai harkat dan martabatnya, bukan malah dieksploitasi demi kepentingan pragmatis bagi seseorang atau sekelompok orang dengan menerapkan cara-cara yang tidak bermoral dan edukatif.⁵⁵

Bila kultur politik seperti ini tetap mengalami pembiaran, maka akan menjadi preseden buruk terhadap martabat politik di Indonesia. Berdasarkan kecenderungan faktual di atas, dalam kaca mata kritik sosial dalam bingkai politik kesejahteraan sosial, maka perlu ada beberapa catatan kritis yang mesti menjadi diskursus publik di Manggarai.

1. Bila pemilihan langsung ini lebih banyak berdampak buruk (mudarat) dari pada manfaatnya, maka negara harus membuat evaluasi terhadapnya. Pada tataran normatif, negara perlu melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tiga hal utama, yakni: substansi, sistem dan implementasinya. Namun pada tataran radikal, pemilihan langsung dirubah lagi menjadi pemilihan tidak langsung melalui kanal DPR/DPRD. Tanpa menganggangi hak asasi politik masyarakat, pemilihan tidak langsung akan lebih hemat dalam hal biaya, dan energi masyarakat dan negara lebih fokus dicurahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan.
2. Lembaga penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu), harus menjalankan fungsi edukasi, pencegahan dan penindakan secara lebih profesional, terutama terkait dengan upaya mengeksploitasi masyarakat (adat) Manggarai dengan memainkan politik busuk seperti memainkan politik uang, mengumbar janji politik fantastis dan tidak realistis, mendesain kampanye hitam, dan mendramatisasi politik balas

⁵³ Tadjoeeddin, Mohammad Z. Electoral Conflict and The Maturity of Local Democracy in Indonesia: testing the modernisation hypothesis. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 17 (3), (2012). 476-497. DOI: [10.1080/13547860.2012.694705](https://doi.org/10.1080/13547860.2012.694705)

⁵⁴ Arizona, Yance & Erasmus Cahyadi, *The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat*, Göttingen University Press, 2019. 43-62.

⁵⁵ Duile, Timo, *Indigenous Peoples, the State, and the Economy in Indonesia; National Debates and Local Processes of Recognition*, ASEAS: *Austrian Journal of South-East Asean Studies*, 13 (1). 2020. 155-160. DOI: <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0034>

budi. Sistem edukasi, pencegahan dan penindakan profesional, perlu melibatkan perguruan tinggi, lembaga agama dan lembaga adat itu sendiri.

3. Lembaga agama (gereja, masjid, dll) harus selalu memberi seruan moral kepada masyarakat dan para politik untuk tidak terjebak mendapatkan jabatan publik dan kekuasaan melalui politik busuk. Seruan tersebut bisa disampaikan melalui kotbah, media sosial dan media massa lainnya. Sekitar 83% masyarakat Manggarai adalah umat Katolik. Sebagai otoritas moral di Manggarai, seruan gereja lokal tentang keharusan menghindari keterjebakan politik uang, kampanye hitam, janji manis dan politik balas budi oleh para politisi dan masyarakat, menjadi sangat penting. Semangat dasar dari seruan moral ini berpijak pada semangat orang Manggarai selalu menjunjung tinggi persaudaraan, kekeluargaan dan keseimbangan sosial lingkungan, yang diungkapkan dengan pribahasa: 'Teu ce ambo neka woleng lako, muku ce pu'u' neka woleng curup (seia sekata dalam tindakan dan pembicaraan) dan 'nai ca anggik, tuka ca lelung' (satu hati, satu perasaan). Politik hanyalah hajatan sesaat, yang dalam ungkapan Manggarai disebut 'salang tuak' (jalur tuak yang sebentar ada dan tidak ada; sementara), tetapi hubungan sebagai keluarga/keturunan sebagai orang Manggarai, sifatnya sepanjang masa, yang diungkapkan dengan 'salang wae teke tedeng' (jalur air yang selalu mengalir tidak ada hentinya; sepanjang masa). Dalam konteks kritik politik kesejahteraan sosial, sebenarnya kehadiran masyarakat adat dalam ranah politik, bukan saja sebagai representasi dari legitimasi politik elektoral, tetapi juga legitimasi moral sosial. KPU, Bawaslu, Kepolisian, agamawan, pemangku adat dan perguruan tinggi mesti 'lonto leok' (duduk bersama),⁵⁶ demi membahas secara serius mengenai gejala degradasi nilai politik substantif yang terjadi di Manggarai pada dekade terakhir.

KESIMPULAN

Masyarakat adat sebagai bagian dari entitas dan identitas kemanggaraian serta menjadi salah satu anasir perekat kohesitas kultural dan sosial harus tetap menjadi kebanggaan orang manggarai. Sebagai entitas dan identitas serta kebanggaan, masyarakat adat Manggarai harus dijaga keberadaannya, dan dengan dalih apapun harus dilestarikan. Politik sebagai salah satu bagian dari upaya meningkatkan martabat bangsa dan instrumen pembangunan kesejahteraan masyarakat, berkewajiban menyentuh masyarakat adat dan membawa keberuntungan padanya. Secara konstitusional masyarakat adat diakui sebagai salah satu organisme yang telah membentuk sistem negara secara kuat dan ajeg. Dengan demikian, ketika para pelaku politik hendak mendulang suara dan berusaha mendapat legitimasi dari masyarakat adat, maka perlu melakukan kondolidasi dan penetrasi secara sehat dan edukatif. Eksploitasi dan komodifikasi masyarakat adat untuk kepentingan politik pragmatis dengan pola-pola busuk, dengan memainkan politik uang, kampanye hitam, janji manis dan politik balas budi, akan mendegradasi martabat masyarakat adat. Hal tersebut, selain akan menurunkan kualitas

⁵⁶ Tapung, Marianus, et.al., Developing the Value of "Lonto Leok" in Manggarai Culture to Empower the Skills of Social Problem-Solving in Social-Sciences Learning of Junior-High School, *In Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities (ANCOSH 2018) - Revitalization of Local Wisdom in Global and Competitive Era*, 2018. 316-320.

demokrasi politik di negara kita, tetapi juga bisa berdampak pada terceratakn segregasi sosial yang dapat mengganggu stabilitas sosial politik dalam negeri. Untuk itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu langsung senantiasa tetap mengemuka, dengan perubahan yang radikal sekalipun, jika lebih banyak memproduksi anomali dan segregasi sosial moral, baik dalam diri masyarakat adat maupun dalam diri para pelaku politik. Keterlibatan para pihak secara profesional dan profetik moral, seperti KPU, Bawaslu, kepolisian, dan agama (gereja, masjid) sangat diharapkan untuk mengembalikan fitrah politik dan memurnikan lagi peran masyarakat adat sebagai unsur perekat genealogis, kultural dan sosial kehidupan orang Manggarai. Prinsip orang Manggarai; Politik hanyalah sesaat, tetapi hubungan darah/keluarga sepanjang masa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam menyelesaikan riset sosial ini, penulis berterima kasih kepada paket Deno-Madur (DM) yang telah memperkenankan saya untuk ada bersama selama proses konsolidasi dan kampanye menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai 9 Desember 2020. Terima kasih banyak juga kepada kampus Unika St. Paulus Ruteng dan Yayasan St. Paulus Ruteng yang telah memberi kesempatan untuk berada dalam riset ini. Kepada pihak koran online Flores.co, Viva.co.id, dan manggaraikab.go.id yang mengizinkan beberapa dokumentasi fotonya saya gunakan untuk kepentingan tulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alfirdaus, L. & Bria, F., (2020). Identity Politics Within Tribe In Village Government's Head Election: A case study in Wederok Village, Malaka Regency, East Nusa Tenggara, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6 (1), 17-27. DOI: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.23761>
- Anggoro, K., (2017). Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Kajian Lemhannas RI, edisi 29 Maret*, 5-17.
- Arizona, Y. & Cahyadi, E. (2019). *The Revival of Indigenous Peoples: Contestations over a Special Legislation on Masyarakat Adat*, Göttingen University Press, 43-62.
- Banks, J. A. (2004). *Introduction: Democratic Citizenship Education in Multicultural Societies*. In J. A. Banks (Ed.), *Diversity and citizenship education: Global perspectives* (hal. 17–48). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Bataona, M. R., & Bajari, A. (2019). Relasi Kuasa dan Simbol-Simbol Ekonomi-Politik Gereja dalam Kontestasi Politik Lokal Provinsi Ntt, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5 (2), Desember, 121-135. DOI : <https://doi.org/10.24198/jkk.v5i2.8831>
- BPS Manggarai, 2016, 2018, 2019.
- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chabibi, M., (2019). Hukum Tiga Tahap Auguste Comte dan Kontribusinya Terhadap Kajian Sosiologi Dakwah. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3 (1), 14-26. DOI: 10.23971/njppi.v3i1.1191

- D'Cruz, H. & Martyn, J., (2014). *Social Work Research in Practice: Ethical and Political Contexts*, SAGE Publications Ltd: New York. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781446294963>
- Dagur, B. A. (1996). *Kebudayaan Manggarai Sebagai Salah Satu Khasana Kebudayaan Nasional*. Surabaya: Ubhara Press.
- Delmana, L. P., et.al., (2020). Problematika dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, www.journal.kpu.go.id, 1 (2), Mei, 1-20.
- Duile, T., (2020). Indigenous Peoples, the State, and the Economy in Indonesia; National Debates and Local Processes of Recognition, *ASEAS: Austrian Journal of South-East Asean Studies*, 13 (1). 155-160.
DOI: <https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0034>
- Erb, M., (1999). *The Manggaraians, A Guide to Traditional Lifestyles*. Times Subang: Malayasia.
- Fauzi, F. (2014). *Pierre Bourdieu, Menyingkap Kuasa Simbol*. Jakarta: Penerbit Jalasutra
- Haba, John, (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12 (2), 255-267. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v12i2.112>.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (3), 291-308.
<https://doi.org/10.22146/jsp.13082>
- Haryatmoko. (2011). *Etika publik. untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hidayat, S. (2010). Demokrasi Elitis? Relasi Kekuasaan Pasca-Pilkada. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 23(3), 169-180.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/18041711/bawaslu-ungkap-4-modus-politisasi-sara-yang-potensial-terjadi-di-pilkada?page=all>.
- <https://pariwisata.manggaraikab.go.id/begini-proses-pembagian-lodok-lingko-di-manggarai/>
- <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14573991/cerita-para-caleg-berburu-restu-roh-leluhur-jelang-pemilu?page=all>
- Itpolkom, Bappenas, 2017. Indeks kerawanan Pilkada 2017, http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/7_Indeks-Kerawanan-Pemilu-2017.pdf.
- Juditha, C., (2019). Komparasi Sentimen Isu SARA di Portal Berita Online dengan Media Sosial Menjelang Pemilu 2019, *Jurnal Pekommas*, 4 (1), 61-74.
- Keling, G., (2016). Kearifan Budaya Masyarakat Kampung Tradisional Wae Rebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, *Jurnal Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional*, 23 (1), 51-62.
<https://jurnalbpnbali.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/penelitian/article/view/4>
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara*. Magelang: Indonesia Tera

- Kristiyanto, E. O. F. M. (2008). *Sakramen Politik; Mempertanggungjawabkan Memoria*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera.
- Liliweri, A. (2002). *Makna budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LkiS
- Magnis-Suseno, F., (1992). *Filsafat sebagai ilmu kritis*, Kanisius: Jakarta.
- Mahpudin, M., (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dan Implikasinya terhadap Representasi Politik: Kepentingan Adat yang Tersisih, *Politicon. Jurnal Ilmu Politik*, 2 (2), 113-128. DOI: <https://doi.org/10.15575/politicon.v2i2.9035>
- Mariana, D., & Luthfi, H. H., (2017). Democracy, Local Election, and Political Dynasty in Indonesian Politics, *Jurnal Wacana Politik* 2 (2), 88-97. doi.org/10.24198/jwp.v2i2.13998
- Moenawar, M. G., Priatna, W. B., & Santoso, H. (2019). Consciousness Raising dan Partisipasi Politik Suku Baduy Di Era Digital (Tinjauan Awal). *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(1), 69–80. DOI: <https://doi.org/10.46937/17201926591>
- Mudzakki, A., (2011). Revivalisme Masyarakat Adat dalam Politik Lokal di Indonesia Pasca-Soeharto: Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 13 (1), 167-183. DOI: <https://doi.org/10.14203/jmb.v13i1.135>
- Muhlisin, M., Ulumi, H. F. B., & Humaeni, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Masyarakat Adat Di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy Dan Citorek. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), 27–44. DOI: <https://doi.org/10.37950/jkpd.v1i1.4>
- Muhtadi, B., (2019). Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 55-74. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Muur, W., et.al. , Jacqueline, V., Micah R. F. & Robinson, K. (2019). Changing Indigeneity Politics in Indonesia: From Revival to Projects. *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20 (5), 379-396 Doi.org/10.1080/14442213.2019.1669520
- Nayuf, H., (2019). Politisasi Doa: Menalar Pilihan Politik Abraham Terhadap Sodom. *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi*, 5 (2), 112-127. DOI: <https://doi.org/10.37196/kenosis.v5i2.79>
- Ndiung, S. & Bayu, G. W., (2019). Ritus Tiba Meka orang Manggarai Dan relevansinya dengan nilai-nilai karakter, *Jurnal Pendidikan Multikultural Indonesia*. 2 (2), 14-21
- Nugroho, I. (2016). “Positivisme Auguste Comte : Analisa Epistemologis Dan Nilai Etnisnya”, *CAKRAWALA*, 11 (2), 12-25. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v11i2.192>
- Pandor, P. (2015). Menyambut dan Memuliakan Sesama dalam Ritus Tiba Meka OrangManggarai, dalam Armada Riyanto, dkk. *Kearifan Lokal Pancasila: Butir-butir Filsafat*, Keindonesiaan. Yogyakarta: Kanisius
- Permana, U. & Handriana, I., (2020). Pengaruh Politisasi SARA Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Untuk Mengikuti Pemilihan Presiden Tahun 2019, *Syntax-Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*. 5 (2), 126-134. DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i2.930>

- Pranata, Van, M. & Nami, (2020). Peran Elit Lokal dan Budaya Lonto Leok Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih ada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2023, *Jurnal Politicon: Jurnal Program Studi Ilmu Politik*, 11 (1), 85-107.
- Pratiwi, A. E., et.al., 2018. Eksistensi Masyarakat Adat di Tengah Globalisasi, *Jurnal Civise, Media Kajian Kewarganegaraan*, 15 (12), 9-102. DOI: <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>
- Purba, A. S., (2015). Potret Pandangan Akademisi Di Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM (JSP) Mengenai Permasalahan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik Muda*, 4 (1), Januari - Maret, 1 – 12.
- Puri, W. H., (2019). Politik Balas Budi, Buah Simalakama dalam Demokrasi Agraria di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 48 (4), 355-365. DOI: 10.14710/mmh.48.4.2019.355-365
- Qodarsasi, U. & Nevy, R. D. (2019). Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 11 (2). 225-244. DOI: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2282>
- Rafni, Al. (2002). Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Demokrasi*, 1 (1), 1-18.
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saina, F., (2020). Makna dan Nilai-Nilai Pelestarian Upacara *Teing Hang Empo* pada Masyarakat Desa Kombo, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. *Skripsi. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram* <http://repository.ummat.ac.id/1041/1/COVER%20-%20BAB%20123.pdf>
- Sardi, et. al, (2019). Kearifan Lokal: Sebuah Analisis Sosiologi Komunikasi di Manggarai Barat (Local Wisdom: a Sociology of Communication Analysis in West Manggarai) *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Agustus, 136-142.
- Sobari, W., (2013). Elektabilitas dan Mitos Pemilih Rasional: Debat Hasil-Hasil Riset Opini Menjelang Pemilu 2014. *Jurnal Penelitian Politik*, 10 (1), 59-84. DOI: <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i1.218>
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*, 17(1), 31–43. DOI: [10.30742/perspektif.v17i1.92](https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92)
- Suharko, (2005). Masyarakat Sipil, Modal Sosial, dan Tata Pemerintahan yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8 (3), 263-290. <https://doi.org/10.22146/jsp.11045>
- Suparjan, (2010). Jaminan Sosial Berbasis Komunitas: Respon atas Kegagalan Negara dalam Penyediaan Jaminan Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(3), 1-18. <https://doi.org/10.22146/jsp.10952>
- Supriyadi, M., (2015). Politisasi Agama di Ruang Publik: Komunikasi SARA dalam Perdebatan Rational Choice Theory, *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 387-426.

- Susanto, E., et.al., (2020). Proses Upacara Teing Hang Ditinjau dari Nilai-Nilai Pancasila Dan Implikasinya Pada Masyarakat Desa Racang, *Jurnal Undiksa*.
- Tadjoeddin, M. Z. (2012). Electoral Conflict and The Maturity of Local Democracy in Indonesia: testing the modernisation hypothesis. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 17 (3), 476-497. DOI: [10.1080/13547860.2012.694705](https://doi.org/10.1080/13547860.2012.694705)
- Tamma, S., & Timo-Duile, (2020). Indigeneity and the State in Indonesia: The Local Turn in the Dialectic of Recognition, *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 39(2), 270-287. DOI: 10.1177/1868103420905967
- Tapung, M., (2018). *Narasi Bangsa yang Tercecer; Elaborasi Filosofis, Pedagogik Kritis, Sosial dan Politik*. Bandung: Cendikia Press.
- Tapung, M., et.al., (2018). Developing the Value of “Lonto Leok” in Manggarai Culture to Empower the Skills of Social Problem-Solving in Social-Sciences Learning of Junior-High School, *In Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities (ANCOSH 2018) - Revitalization of Local Wisdom in Global and Competitive Era*, 316-320.
- Turistiati, A. T., (2018). Fenomena *Black Campaign* dalam Pemilihan Kepala Daerah 2015, *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 8(2):208-215, DOI: 10.31334/trans.v8i2.72
- Verhaak, C. & Imam, R. H. (1989). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. Gramedia: Jakarta.
- Verheijen, (1967). *Manggarai dan Wujud Tertinggi* (Penerjemah: Alex Beding dan Marcel Beding). Jakarta:LIPI-RUL.
- Wance, M. & Ibrahim, A. (2019). Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan. *Journal of Governance and Local Politics*, 1 (2): 157-174. DOI: <https://doi.org/10.47650/jglp.v1i2.20>
- Wicaksono, D. A. & Yurista, A. P. (2018). Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, 18 (2).275-288, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18>.
- Widjajanto, A. (2005). Kuadran Perdamaian Demokratik: Integrasi Instalasi Demokrasi dan Trajektori Perdamaian. *Global*,7 (2), Mei, 1-18.
- Yuda, T. K., (2017). Governing Alternative Resources for Social Policy: A Welfare Political Challenges on Mixed-Welfare Arrangements, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 21 (2), 87-101, doi: 10.22146/jsp.30433